

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Deskriptif Data

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Wilayah Karesidenan merupakan wilayah yang dijadikan sebagai wilayah administratif negara. Salah satu wilayah karesidenan di Jawa Timur yaitu eks Karesidenan Kediri. Adapun pembagian wilayah eks Karesidenan Kediri terdiri dari 7 wilayah yaitu: Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri dan Kota Blitar. Berikut kondisi geografis masing-masing wilayah eks Karesidenan Kediri.

a. Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek terletak di bagian selatan dari wilayah provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek terletak pada koordinat $111^{\circ} 24' - 112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 63' - 8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah $1.261,40 \text{ km}^2$, dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari $\frac{2}{3}$ tanah pegunungan dan $\frac{1}{3}$ tanah dataran rendah. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan dan 157 desa. Dari 14 kecamatan, hanya 4 kecamatan desanya berada di dataran dan 10 lainnya berada di pegunungan.

b. Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak di antara koordinat $111^{\circ} 43' - 112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 51' - 8^{\circ} 18'$ Lintang Selatan, dimana terletak kurang lebih

154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Adapun luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 1.150,41 km². Kabupaten Tulungagung terdiri dari dataran rendah dan sebagian lagi di dataran tinggi, yang terdiri dari 19 Kecamatan dan 271 desa.

c. Kabupaten Blitar

Secara geografis, kabupaten Blitar terletak pada koordinat 111° 25' – 112° 20' Bujur Timur dan 7° 57' – 8° 9'51" Lintang Selatan. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah sebesar 1.588,79 km², yang terdiri dari 22 kecamatan dan 220 desa. Kabupaten Blitar dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah utara dan selatan. Wilayah utara terdiri dari dataran rendah berupa lahan persawahan, sedangkan wilayah selatan terdiri dari wilayah lahan kering.

d. Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri terletak pada koordinat 111° 47'05" – 112° 18'20" Bujur Timur dan 7° 36'12" – 8° 0'32" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kediri sebesar 1.386,05 km² yang terdiri dari 26 kecamatan dan 343 desa. Kabupaten Kediri terdiri dari wilayah perbukitan kurang subur di sebelah barat, dataran rendah subur di bagian tengah dan bagian timur perbukitan yang subur.

e. Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk disebut juga dengan kabupaten Berbek. Wilayahnya terletak pada koordinat 111° 5' – 112° 13' Bujur Timur dan 7° 20' – 7° 50' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk sebesar 1.224,331 km².

Wilayahnya terdiri dari dataran tinggi pegunungan dan dataran rendah berupa daerah kering, daerah banjir dan daerah pertanian subur. Kabupaten Nganjuk terdiri dari 20 kecamatan dan 284 desa.

f. Kota Blitar

Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar yang terletak pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2' - 8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Adapun luas wilayahnya kurang lebih sebesar $32,58 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 21 kelurahan. Kota Blitar seluruh daerahnya meliputi perkotaan yaitu pemukiman, perdagangan, layanan publik, pertanian, dan perkarangan.

g. Kota Kediri

Kota Kediri terletak pada koordinat antara $111^{\circ} 15' - 112^{\circ} 03'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 45' - 7^{\circ} 55'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Kediri sebesar $63,40 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Wilayah Kota Kediri berada di dalam kabupaten Kediri, yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, dimana wilayahnya didominasi dengan wilayah perindustrian.

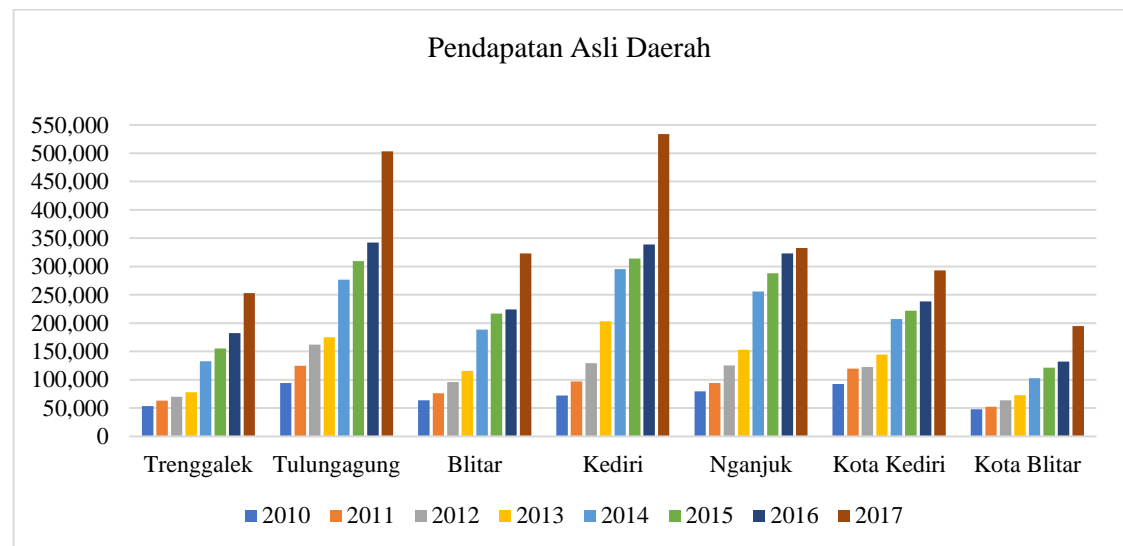
2. Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Kediri

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu bagian dari sumber penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah ini dijadikan sebagai cermin kemandirian daerah dalam pembangunan daerah. Daerah yang dapat menghasilkan jumlah kontribusi PAD yang besar pada

penerimaan daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan sudah mampu dan mandiri dalam memanfaatkan potensi daerahnya secara optimal.

Dari data keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, didapatkan data pendapatan asli daerah 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kediri, berikut grafik PAD mulai tahun 2010 sampai 2017.

Gambar 4.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2010 Sampai 2017 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Lampiran 1, data diolah

Berdasarkan gambar grafik 4.1 di atas, menggambarkan bahwa setiap tahunnya, mulai dari tahun 2010 sampai 2017 setiap wilayah Kabupaten/kota eks Karesidenan Kediri mengalami peningkatan kenaikan PAD. Tingkat kenaikan yang terjadi di setiap wilayah sangat berfluktuatif, dimana artinya setiap wilayah sudah menerapkan otonomi daerah dengan memaksimalkan usaha dalam memanfaatkan potensi masing-masing daerah yang dimilikinya dengan cara berbeda-beda. Meskipun terjadi kenaikan setiap tahunnya, rata-rata realisasi PAD

di setiap wilayah masih tergolong relatif rendah dari total penerimaan daerah, hal ini berarti belum optimal dalam mengelola keuangannya. Jika dilihat dari ketujuh wilayah besarnya PAD yang diterima belum seimbang, masih terdapat daerah yang mempunyai PAD rendah sebesar 194.765 juta rupiah pada tahun 2017 yaitu Kota Blitar dan PAD tertinggi diperoleh oleh daerah Kabupaten Kediri sebesar 533.993 juta Rupiah.

Akibat dari rendahnya dan ketidakseimbangan antara PAD yang diterima oleh 7 Kabupaten/kota eks Karesidenan Kediri, berdasarkan data laporan publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dari semua Kabupaten/kota memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintahan pusat dalam pendapatannya.¹¹¹ Sehingga kontribusi pendapatan transfer atau dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD. Sehingga wilayah Kabupaten/kota se eks Karesidenan Kediri mengalami ketidakseimbangan dalam pembangunan daerah.

3. Produk Domestik Regional Bruto di Eks Karesidenan Kediri

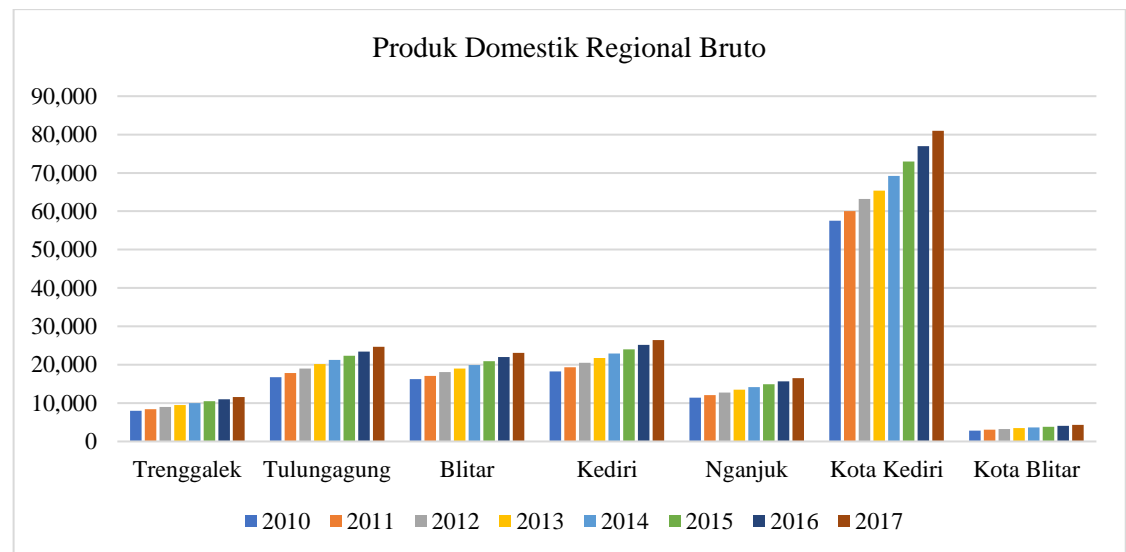
Produk Domestik Regional Bruto digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto adalah semua hasil penjumlahan nilai yang dapat diciptakan oleh seluruh aktivitas dari sektor-sektor ekonomi. Dimana PDRB disajikan dalam dua bentuk yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto yang dapat menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu

¹¹¹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*, dalam www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412, di akses 14 September 2018

wilayah dapat dilihat pada PDRB menurut lapangan usaha, dimana di dalamnya menggambarkan tujuh belas sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi, maka digunakan PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan. Berikut data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha se eks Karesidenan Kediri tahun 2010 sampai 2017 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 Sampai 2017 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Lampiran 2, data diolah

Dari gambar grafik 4.2 diatas, menjelaskan bahwa besarnya nilai produk domestik regional bruto setiap wilayah mengalami kenaikan mulai tahun 2010 sampai 2017. Hal ini menggambarkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang berada

di wilayah eks Karesidenan Kediri mengalami perkembangan yang pesat dalam menyumbangkan pendapatannya pada pertumbuhan ekonomi, sehingga akan menambah pendapatan bagi pemerintah daerah. Produk domestik regional bruto terbesar diperoleh oleh Kota Kediri, pada tahun 2017 diperoleh PDRB sebesar 80.946,20 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan potensi kota Kediri sendiri, yang didominasi dengan sektor perindustrian dan sektor pariwisata yang semakin meningkat. Sedangkan PDRB terkecil diperoleh oleh Kota Blitar pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.315 milyar rupiah. Kecilnya PDRB Kota Blitar karena wilayahnya tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup.

Berdasarkan data perolehan PDRB dari ke tujuh Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dari semua sektor,¹¹² didominasi oleh sektor pertanian; pertambangan; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan dengan tingkat yang berbeda-beda. Adapun data perolehan PDRB berbeda di antara wilayah disebabkan oleh kondisi potensi wilayah itu sendiri yang dapat dikembangkannya berbagai sektor yang dapat tumbuh pesat, sehingga dapat meningkatkan PDRB untuk pertumbuhan ekonomi.

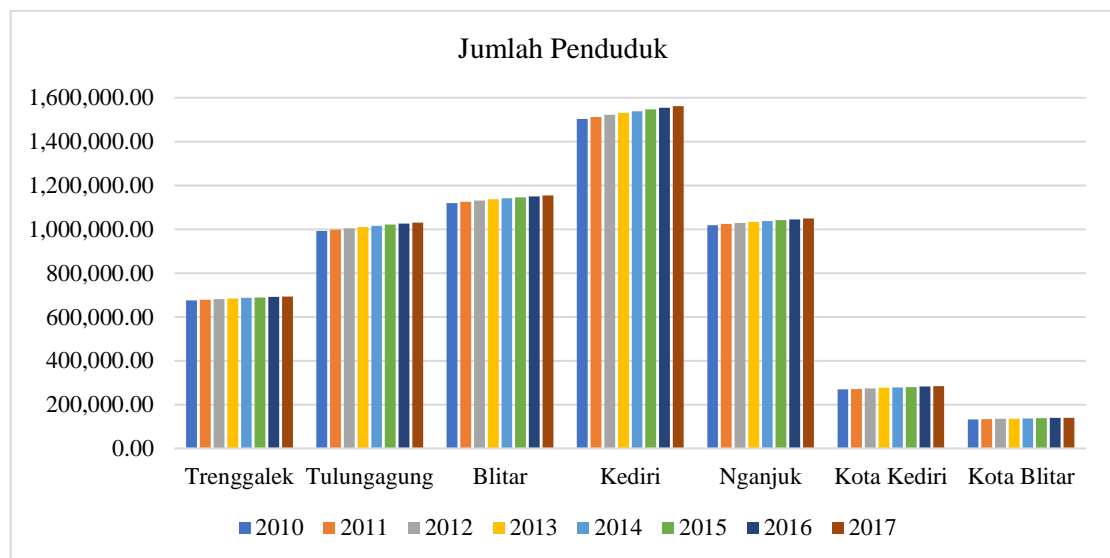
4. Jumlah Penduduk di Eks Karesidenan Kediri

Penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peranan penduduk juga berarti penting sebagai

¹¹² Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi...*, hal. 22

penggerak aktivitas perekonomian yang ada. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk akan menambah adanya tenaga kerja. Dengan banyaknya penduduk yang bekerja, maka akan menambah pendapatan dan juga penduduk akan banyak memakai fasilitas yang disediakan pemerintah, sehingga penduduk juga akan membayar pajak yang ditetapkan. Berikut data jumlah penduduk se eks Karesidenan Kediri tahun 2010 sampai 2017 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2010 Sampai 2017 (dalam Jiwa)



Sumber: Lampiran 3, data diolah

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang ada di 7 Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun laju pertumbuhan berfluktuasi dan adanya perbedaan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dari grafik tersebut, wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Kediri dimana dari tahun

2010 sampai tahun 2017, jumlah penduduknya lebih banyak dari pada wilayah yang lain. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu Kota Blitar. Rendahnya jumlah penduduk Kota Blitar bisa disebabkan karena kecilnya luas wilayah Kota Blitar.

Pertambahan penduduk yang cenderung meningkat secara terus menerus di eks karesidenan Kediri tidak hanya disebabkan oleh pertambahan penduduk secara ilmiah akan tetapi juga disebabkan oleh adanya migran yang masuk, dimana mereka tertarik akan sektor-sektor perekonomian yang dimiliki oleh wilayah eks karesidenan Kediri, dimana apabila lapangan pekerjaan semakin banyak dan semakin kondusifnya peluang usaha maka jumlah penduduk akan bertambah. Secara keseluruhan setiap wilayah terus mengalami pertambahan penduduk, sehingga semakin banyaknya tenaga kerja dan orang yang bekerja, maka akan dapat mempengaruhi pendapatan pada wilayah tersebut.

Jumlah penduduk yang berada di wilayah Eks Karesidenan Kediri terdiri dari penduduk yang berusia bayi sampai lanjut usia. Di dalamnya terdapat penduduk yang produktif maupun tidak produktif. Banyak penduduk yang diusia produktif belum bekerja karena sekarang ini banyak dari mereka yang masih berada dalam lingkungan sekolah dan perkuliahan, serta terdapat orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik sehingga tidak dapat bekerja secara produktif, selain itu terdapat usia produktif akan tetapi pengangguran. Ditambah lagi jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki yang artinya penduduk perempuan akan

cenderung lebih tidak produktif dibandingkan laki-laki. Berikut data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kediri.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Se Eks Karesidenan Kediri Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016-2017 (dalam Jiwa)

Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan	
	2016	2017	2016	2017
Kab. Trenggalek	343.402	344.389	347.893	348.715
Kab. Tulungagung	500.191	502.516	525.910	528.274
Kab. Kediri	780.097	783.589	774.288	777.803
Kab. Blitar	575.877	578.015	573.833	575.788
Kab. Nganjuk	519.717	521.388	525.658	527.411
Kota Kediri	140.503	141.609	141.475	142.394
Kota Blitar	69.001	69.411	70.116	70.584

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, diolah¹¹³

5. Pengeluaran Pemerintah Daerah di Eks Karesidenan Kediri

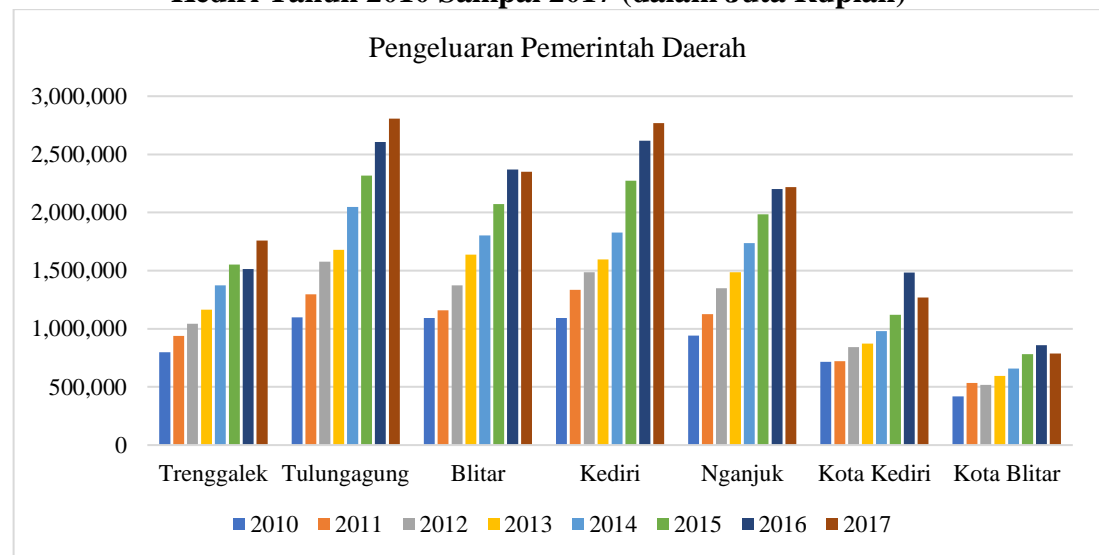
Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah mempunyai suatu kebijakan yang diterapkan dengan tujuan tertentu demi terciptanya bentuk pelayanan kepada masyarakat yang baik. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu adanya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah adalah pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menunjang berjalannya pemerintahan.

Peranan pengeluaran pemerintah daerah dalam wujud pembangunan sarana prasarana yang ditujukan untuk masyarakat akan menunjang kegiatan perekonomian lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

¹¹³ Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2015), hal. 9

Dengan demikian meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan pendapatan bagi daerah. Berikut data pengeluaran pemerintah daerah 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kediri, yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam data keuangan tahun 2010 sampai 2017.

Gambar 4.4
Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2010 Sampai 2017 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Lampiran 4, data diolah

Gambar grafik 4.4 diatas, menjelaskan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan pada masing-masing wilayah berbeda. Ada tiga wilayah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun tingkat kenaikannya fluktuatif. Dan terdapat 4 wilayah yang mengalami besaran nilai pengeluaran pemerintah yang naik turun pada tahun 2015 sampai tahun 2017, yaitu wilayah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri dan Kota Blitar. Pada tahun 2017, pengeluaran pemerintah tertinggi dilakukan oleh Kabupaten Tulungagung sebesar 2.808.565,47 milyar rupiah dan terendah adalah Kabupaten Blitar sebesar

786.297,31 milyar rupiah. Adanya tingkatan kenaikan dan penurunan pengeluaran pemerintah mencerminkan bahwa masing-masing pemerintah daerah mempunyai kebijakan sendiri dalam mengatur wilayahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan semakin besarnya pengeluaran pemerintah, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diterima daerah.

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah terdiri dari tiga jenis perbelanjaan, yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Adapun pengeluaran pemerintah yang paling berpengaruh terhadap pembangunan daerah adalah belanja modal, dimana belanja modal akan diorientasikan kepada pembangunan kepada infrastruktur. Pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri didominasi oleh belanja operasi atau belanja tidak langsung, yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja barang, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dari segi belanja modalnya yang terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap dan aset lainnya, masih relatif sedikit yang mengakibatkan pembangunan daerah yang direncanakan belum bisa terealisasi dengan baik. Berikut data realisasi belanja pemerintah Kabupaten/kota Se Eks Karesidenan Kediri.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri
(dalam Milyar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2017			2016		
	Total Belanja	Belanja operasi	Belanja modal	Total Belanja	Belanja operasi	Belanja modal
Kab. Blitar	2,350,59	1,297,93	1,052,66	2,368,67	1,328,48	1,040,19
Kab. Kediri	2,768,99	1,593,67	1,175,32	2,617,07	1,632,64	984,48
Kab. Nganjuk	2,219,04	1,351,16	867,89	2,201,12	1,361,03	840,09
Kab. Trenggalek	1,759,71	989,02	770,69	1,514,17	863,77	650,40
Kab. Tulungagung	2,808,57	1,667,42	1,141,15	2,606,29	1,534,65	1,071,64
Kota Blitar	786,30	273,50	512,80	857,80	375,00	482,79
Kota Kediri	1,269,94	673,18	596,76	1,484,73	757,37	727,36

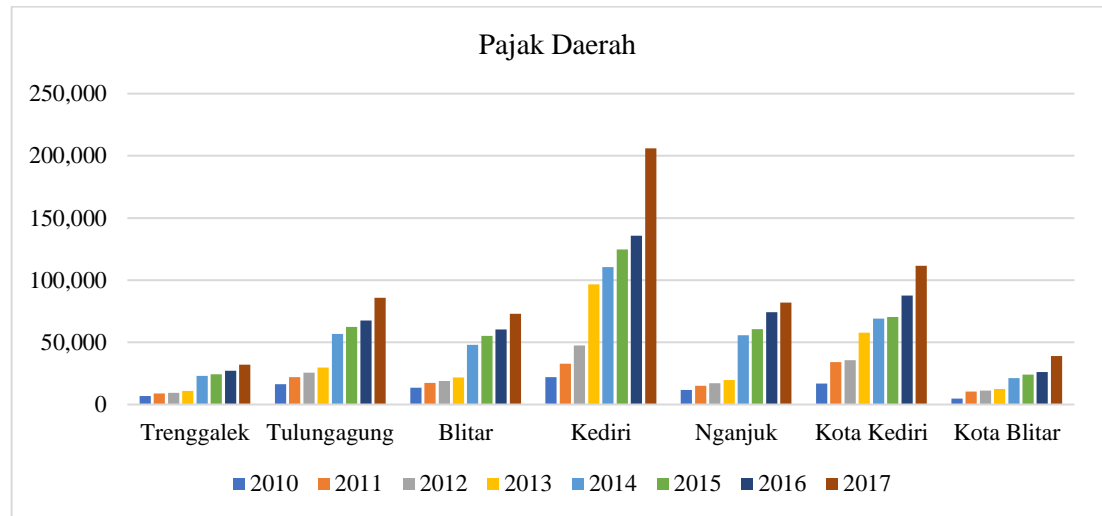
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah¹¹⁴

6. Pajak Daerah di Eks Karesidenan Kediri

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah suatu wilayah berasal dari pajak daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, maka akan menambah penerimaan pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat. Kemudian pajak ini akan masuk menjadi penerimaan pendapatan bagi daerah yang akan digunakan kembali untuk pembangunan daerah. Dari data keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terdapat data pajak daerah 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kediri dari tahun 2010 sampai 2017, berikut gambar grafiknya.

¹¹⁴ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*, dalam www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412, di akses 14 September 2018

Gambar 4.5
Pajak Daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2010
Sampai 2017 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Lampiran 5, data diolah

Gambar grafik 4.5 diatas, menjelaskan bahwa terjadinya kenaikan besarnya pajak daerah secara terus menerus mulai tahun 2010 sampai 2017. Masing-masing Kabupaten/kota mengalami kenaikan yang fluktuatif artinya tingkat kenaikan dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Dari ketujuh Kabupaten/kota besarnya pajak yang diterima belumlah seimbang masih terdapat wilayah yang memperoleh pajak daerah yang rendah yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kota Blitar. Tinggi rendahnya pajak daerah menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya berbeda-beda. Dapat juga tinggi rendahnya disebabkan karena potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah berbeda, serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mengalami kenaikan yang berarti bahwa akan menambah besarnya penerimaan pendapatan bagi daerah.

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Eks
Karesidenan Kediri (dalam Persen)

Kabupaten/ Kota	PAD		Kontribusi Pajak	
	2016	2017	2016	2017
Kab. Blitar	224,106,765,168.87	322,878,943,149.35	26.87	22.58
Kab. Kediri	339,113,897,821.74	533,992,500,760.13	40.02	38.58
Kab. Nganjuk	323,045,177,741.96	332,497,755,198.12	22.99	24.65
Kab. Trenggalek	182,174,291,709.04	253,205,318,427.55	14.90	12.65
Kab. Tulungagung	342,570,756,798.97	503,103,394,882.52	19.69	17.06
Kota Blitar	131,920,190,720.68	194,764,731,102.98	19.71	20.02
Kota Kediri	238,318,315,508.41	293,065,134,148.36	36.77	38.03

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah¹¹⁵

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sumbangan pajak dari 7 Kabupaten/Kota memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kediri. Pajak daerah memiliki sumbangan lebih besar daripada komponen penerimaan PAD lainnya seperti, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan besarnya pajak daerah, maka pembangunan daerah akan terealisasi sehingga menciptakan daerah yang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya.

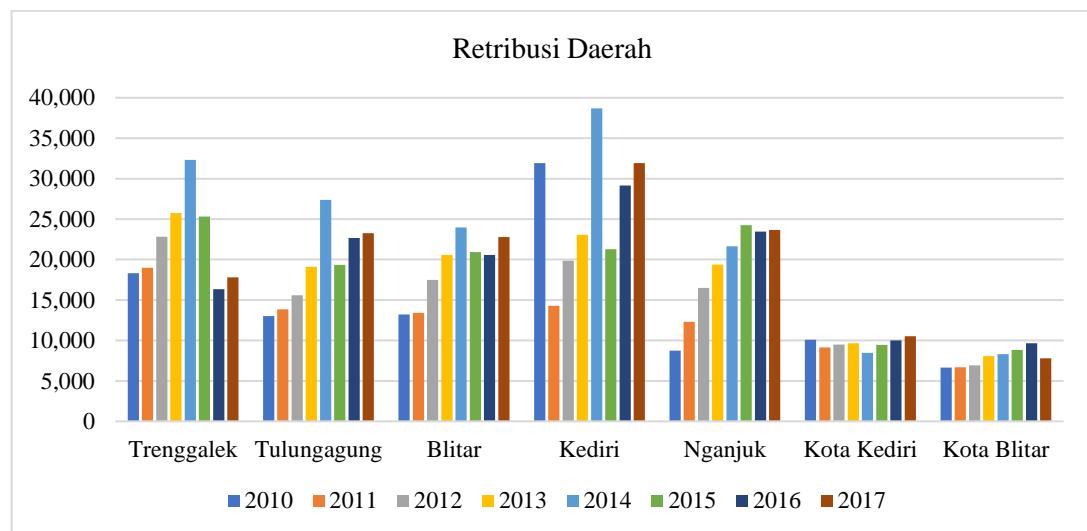
7. Retribusi Daerah di Eks Karesidenan Kediri

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi sumber penerimaan bagi pendapatan daerah. Retribusi daerah berbeda dengan pajak, dimana retribusi daerah merupakan bentuk pembayaran yang dibayarkan masyarakat atas jasa ataupun perizinan yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki suatu daerah juga akan

¹¹⁵ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*, dalam www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412, di akses 14 September 2018

menghasilkan retribusi bagi daerah tersebut, dengan adanya pengelolaan potensi maka akan meningkatkan pajak sekaligus retribusi daerah. Adanya peningkatan retribusi daerah maka akan kembali lagi digunakan untuk pembangunan daerah seperti sarana prasana dan infrastruktur yang akan menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Berikut data tentang retribusi daerah 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kediri yang didapat dari data keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari tahun 2010 sampai 2017.

Gambar 4.6
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2010
Sampai 2017 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Lampiran 6, data diolah

Berdasarkan gambar grafik 4.6 di atas, menggambarkan bahwa secara keseluruhan retribusi daerah yang diterima dari ketujuh Kabupaten/Kota besarnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kota Blitar memiliki retribusi daerah yang paling rendah dibandingkan dari Kabupaten/Kota yang lain. Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya alam yang berada di Kota Blitar yang

terbatas, sehingga pengadaan adanya retribusi daerah sangat kurang. Kota Blitar sendiri hanya mengandalkan kekuatan dari kualitas sumber daya manusianya.

Tabel 4.4
Kontribusi Retribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri (dalam Persen)

Kabupaten/ Kota	PAD		Kontribusi Retribusi	
	2016	2017	2016	2017
Kab. Blitar	224,106,765,168.87	322,878,943,149.35	9.18	7.06
Kab. Kediri	339,113,897,821.74	533,992,500,760.13	8.59	5.98
Kab. Nganjuk	323,045,177,741.96	332,497,755,198.12	7.26	7.11
Kab. Trenggalek	182,174,291,709.04	253,205,318,427.55	8.97	7.03
Kab. Tulungagung	342,570,756,798.97	503,103,394,882.52	6.62	4.62
Kota Blitar	131,920,190,720.68	194,764,731,102.98	7.32	3.99
Kota Kediri	238,318,315,508.41	293,065,134,148.36	4.19	3.59

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah¹¹⁶

Dari data tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa besarnya kontribusi retribusi daerah sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/kota Se Eks Karesidenan Kediri. Hal ini dapat dikatakan bahwa masing-masing wilayah belum sepenuhnya dapat mengolah potensi wilayahnya sehingga dapat menghasilkan retribusi daerah untuk sumber penerimaan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Terjadinya fluktuasi secara keseluruhan dalam penerimaan retribusi daerah disebabkan kecenderungan dari belum optimalnya masing-masing daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya, sehingga ditahun 2014 sampai tahun 2017 banyak yang mengalami penurunan. Hal ini akan menyebabkan pendapatan asli daerah masing-masing Kabupaten/Kota akan berkurang karena sumbangan retribusi daerah pada total penerimaan pendapatan masing rendah.

¹¹⁶ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*, dalam www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412, di akses 14 September 2018

B. Pengujian Data

1. Estimasi Model Regresi Data Panel

a. Pendekatan *Common Effect Model/ Pooled Least Squares* (CEM/PLS)

Tahapan pertama yang dilakukan yaitu mengolah data dengan menggunakan metode *Common Effect Model*, yang akan dijadikan sebagai persyaratan untuk melakukan uji *F-Restricted* atau uji *Chow*. Dari hasil pengolahan data dengan software *Eviews 10* diperoleh hasil output sebagai berikut.

Tabel 4.5
Regresi Data Panel *Common Effect Model*

R-squared	0.952454
Adjusted R-squared	0.947699

Sumber: Lampiran 7, data diolah

b. Pendekatan *Fixed Effect Model*

Kemudian setelah pengolahan data dengan model regresi pertama, setelah itu diolah menggunakan metode pendekatan *Fixed Effect Model*, dimana model ini akan dibandingkan dengan metode pendekatan *Common Effect Model* pada uji *Chow* atau uji *F-Restricted*. Dari hasil pengolahan data dengan software *Eviews 10* diperoleh hasil output sebagai berikut.

Tabel 4.6
Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

R-squared	0.981505
Adjusted R-squared	0.976881

Sumber: Lampiran 7, data diolah

c. Pendekatan *Random Effect Model*

Model estimasi regresi data panel yang terakhir yaitu metode pendekatan *Random Effect Model*, dimana akan dibandingkan dengan *Fixed Effect Model* pada uji *Hausman*. Dari hasil pengolahan data dengan software *Eviews 10* diperoleh hasil output sebagai berikut.

Tabel 4.7
Regresi Data Panel *Random Effect Model*

R-squared	0.963257
Adjusted R-squared	0.959582

Sumber: Lampiran 7, data diolah

2. Uji Pemilihan Metode Regresi Data Panel

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* dilakukan untuk menguji model manakah yang terpilih antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Untuk mengetahui model estimasi data panel yang digunakan, pada uji *Chow* dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas *Cross-section F* dengan taraf signifikansi. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut.

H_0 : *Common Effect Model (Restricted)*

H_1 : *Fixed Effect Model (Unrestricted)*

Hasil dari uji *Chow* yang berdasarkan metode *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*, diperoleh nilai *F-statistic* atau probabilitas *Cross-section F* sebagai berikut.

Tabel 4.8
Output Uji Chow/ F-Restricted

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: CEM				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		11.518876	(6,44)	0.0000
Cross-section Chi-square		52.875198	6	0.0000

Sumber: Lampiran 7, data diolah

Berdasarkan hasil *output* uji *Chow* dalam tabel 4.8 tersebut, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000, dimana nilainya lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak yang artinya menolak model *Common Effect* dan menerima *Fixed Effect Model*, dimana estimasi *Fixed Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*.

b. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* dilakukan untuk menguji model manakah yang terpilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Untuk mengetahui model estimasi data panel yang digunakan, pada uji *Hausman* dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas *Cross-section Random* dengan taraf signifikansi. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut.

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Hasil dari uji *Hausman* yang berdasarkan metode *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Random* sebagai berikut.

Tabel 4.9
Output Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: REM				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		20.278683	5	0.0011

Sumber: Lampiran 7, data diolah

Berdasarkan hasil *output* uji *Hausman* dalam tabel 4.9 tersebut, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar 0,0011, dimana nilainya lebih kecil dari 0,05 ($0,0011 < 0,05$), sehingga dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak yang artinya menolak *Random Effect Model* dan menerima *Fixed Effect Model*, sehingga dapat disimpulkan model terbaik yang akan digunakan untuk penelitian adalah model *Fixed Effect Model*.

3. Pengujian Asumsi Klasik

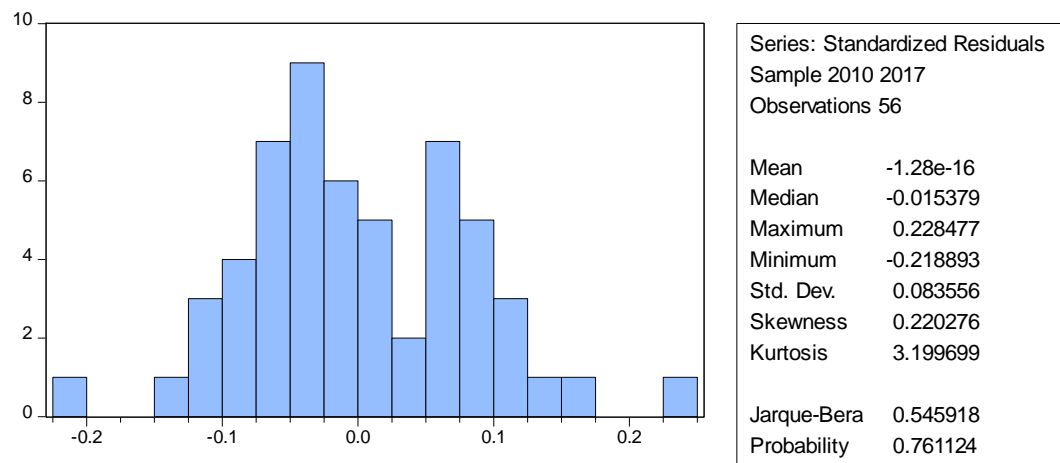
Uji Asumsi Klasik dalam data panel dapat dilakukan dengan cara merubah data tersebut menjadi data *stack*, yaitu proses penggabungan data semua *pool*-nya menjadi satu. Karena dalam *software Eviews* yang menggunakan data panel yang berupa data *unstack*, tidak terdapat menu yang digunakan untuk uji asumsi klasik. Setelah dilakukannya penggabungan data (*stack*), dapat dilakukan uji multikolinearitas yaitu menguji korelasi parsial antar variabel bebasnya. Sedangkan untuk uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi,

sebelum melakukan ketiga uji tersebut, maka harus dilakukan estimasi dengan model yang terpilih terlebih dahulu yaitu *Fixed Effect Model*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah *residual* data mempunyai distribusi normal. Uji ini dilakukan dengan cara melihat nilai *probability Jarque Bera* yang dibandingkan dengan taraf signifikan. Berikut hasil *output* dari uji normalitas data yang diuji dalam model estimasi *Fixed Effect*.

Gambar 4.7
Output Uji Normalitas Histogram Normality



Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan gambar histogram 4.7 di atas, dapat dilihat hasil perolehan nilai *probability Jarque-Bera* sebesar 0,761124, dimana nilainya lebih besar dari 0,05 ($0,761124 > 0,05$), sehingga dapat diputuskan bahwa menerima H_0 yang artinya data tersebut memiliki residual data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Selanjutnya persyaratan uji asumsi klasik yang kedua yaitu terbebas dari multikolinearitas. Ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari

besarnya koefisien korelasi masing-masing (parsial) variabel bebas. Jika nilai koefisien korelasi parsial variabel lebih besar dari 0,85, maka terjadi gejala multikolinearitas, Berikut hasil *output* uji multikolinearitas yang diolah dengan *software Eviews 10*.

Tabel 4.10
Output Uji Multikolinearitas

Correlation					
	LOGPDRB	LOGJP	LOGPP	LOGPJK	LOGRTB
LOGPDRB	1.000000	0.321397	0.424266	0.609272	0.184978
LOGJP	0.321397	1.000000	0.787009	0.326858	0.821818
LOGPP	0.424266	0.787009	1.000000	0.718043	0.796318
LOGPJK	0.609272	0.326858	0.718043	1.000000	0.394096
LOGRTB	0.184978	0.821818	0.796318	0.394096	1.000000

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, menunjukkan besarnya nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel tidak lebih dari 0,85, yang berarti bahwa data tersebut terbebas dari gejala multikolineritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya ke tahap uji heteroskedastisitas, uji ini dapat dilihat dari hasil estimasi *fixed effect* dengan cara terlebih dahulu etimasi tersebut dirubah menjadi GLS yang *Cross-section Weight*. Setelah itu dari hasil *output* tersebut nilai *Sum Squared Resid* pada *Weight Statistic* dibandingkan dengan *Sum Squared Resid* pada *Unweight Statistic*. Jika *Sum Squared Resid* pada *Weight Statistic* nilainya lebih kecil dari *Sum Squared Resid* pada *Unweight Statistic*, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut *output* hasil dari uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.11
Output Uji Heteroskedastisitas

Weighted Statistics			
R-squared	0.984277	Mean dependent var	28.17150
Adjusted R-squared	0.980346	S.D. dependent var	7.111271
S.E. of regression	0.093063	Sum squared resid	0.381074
F-statistic	250.4052	Durbin-Watson stat	1.619936
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.981390	Mean dependent var	25.74188
Sum squared resid	0.386376	Durbin-Watson stat	1.398044

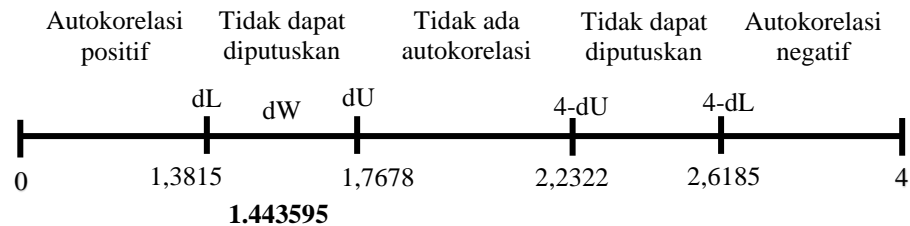
Sumber: Lampiran 7, data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Sum Squared Resid* pada *Weight Statistic* sebesar 0,381074 lebih kecil dari nilai *Sum Squared Resid* pada *Unweight Statistic* sebesar 0,386376 ($0,381074 < 0,386358$) yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dapat dilihat dengan cara mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (dW) yang dihasilkan. Ketika nilai $dW > dU$ dan $dW < 4 - dU$, maka tidak terjadi autokorelasi. Adapun *output* hasil uji autokorelasi, hasil perolehan nilai dW sebesar 1.443595. Nilai dU yang dihasilkan dengan cara melihat tabel *durbin-watson* diperoleh sebesar 1,7678 dan dL sebesar 1,3815. Berikut pengambilan keputusan pada uji autokorelasi yang dibandingkan dengan dU dan dL.

Gambar 4.8
Uji Autokorelasi



Sumber: Lampiran 7, data diolah

Berdasarkan gambar grafik 4.8 pengujian hasil autokorelasi, menunjukkan bahwa data tidak dapat diputuskan mengenai adanya gejala autokorelasi atau tidak. Sehingga kesimpulannya data tersebut mengalami dalam keraguan-raguan masalah autokorelasi. Dengan adanya gejala autokorelasi, maka data tersebut dapat disembukan dengan cara menyajikan *standard error* yang konsisten. Caranya yaitu dengan mengubah *Coef. Covariance* dari *Ordinary* menjadi *White (diagonal)*. Dimana hasil uji ini hanya akan merubah *standard error* menjadi konsisten, sehingga model estimasi dapat dilanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji F dan uji T, meskipun terdapat masalah autokorelasi.

4. Interpretasi Model Regresi Data Panel

Berdasarkan tabel *output fixed effect model* yang sudah diperbaiki dengan *white (diagonal)* karena autokorelasi di dibawah ini, dapat diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{LogPAD}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LogJP}_{it} + \beta_3 \text{LogPP}_{it} + \beta_4 \text{LogPD}_{it} + \beta_5 \text{LogRD}_{it} + e_{it}$$

$$\text{LogPAD} = 77,18893 + 3,175469\text{LogPDRB}_{it} - 11,96984\text{LogJP}_{it} + 0,062730\text{LogPP}_{it} + 0,419523\text{LogPD}_{it} + 0,009768\text{LogRD}_{it}$$

Tabel 4.12
Hasil Output Fixed Effect Model Dengan White Diagonal

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	77.18893	43.21261	1.786259	0.0809
LOG(PDRB?)	3.175469	0.865104	3.670619	0.0007
LOG(JP?)	-11.96984	4.405607	-2.716957	0.0094
LOG(PP?)	0.062730	0.238778	0.262713	0.7940
LOG(PJK?)	0.419523	0.071135	5.897590	0.0000
LOG(RTB?)	0.009768	0.075993	0.128535	0.8983
Fixed Effects (Cross)				
_TRENGGALEK--C	2.285878			
_TULUNGAGUNG--C	4.858088			
_BLITAR--C	6.093348			
_KEDIRI--C	9.245115			
_NGANJUK--C	6.299942			
_KOTAKEDIRI--C	-14.78953			
_KOTABLITAR--C	-13.99285			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.981505	Mean dependent var	25.74188	
Adjusted R-squared	0.976881	S.D. dependent var	0.614400	
S.E. of regression	0.093419	Akaike info criterion	-1.716041	
Sum squared resid	0.383991	Schwarz criterion	-1.282037	
Log likelihood	60.04913	Hannan-Quinn criter.	-1.547778	
F-statistic	212.2741	Durbin-Watson stat	1.443595	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber; Lampiran 7, data diolah

Dari persamaan tersebut, yang didasarkan pada tabel 4.12 dapat menjelaskan arah hubungan antara masing-masing variabel bebas (PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah) terhadap variabel terikat (PAD) yang dilihat dari tanda dan besarnya nilai koefisien regresi, berikut interpretasi dari hasil estimasi tersebut.

- a. Konstanta atau intersep yang dihasilkan dari estimasi sebesar 77,18893, yang berarti bahwa PAD akan mengalami kenaikan sebesar 77,18893 satuan ketika besarnya variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah dalam keadaan tetap.
- b. Koefisien regresi variabel PDRB sebesar 3,175469, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan PAD sebesar 3,175469 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya PDRB maka semakin tinggi pula jumlah PAD di eks karesidenan Kediri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.
- c. Koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar -11,96984, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan PAD sebesar 11,96984 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya jumlah penduduk maka semakin menurunnya jumlah PAD di eks karesidenan Kediri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.
- d. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,062730, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan PAD sebesar 0,062730 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin

tingginya pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pula jumlah PAD di eks karesidenan Kediri. Akan tetapi, secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, yang artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah belum tentu akan meningkatkan PAD di eks karesidenan Kediri.

- e. Koefisien regresi variabel pajak daerah sebesar 0,419523, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak daerah sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan PAD sebesar 0,419523 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya pajak daerah maka semakin tinggi pula jumlah PAD di eks karesidenan Kediri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.
- f. Koefisien regresi variabel retribusi daerah sebesar 0,009768, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan PAD sebesar 0,009768 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya retribusi daerah maka semakin tinggi pula jumlah PAD di eks karesidenan Kediri. Akan tetapi, secara parsial variabel retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, yang

artinya meningkatnya variabel retribusi daerah belum tentu akan meningkatkan PAD di eks karesidenan Kediri.

Selain hasil interpretasi di atas estimasi regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* dapat digunakan untuk mengestimasi model data panel pada masing-masing *cross section* yaitu berupa kabupaten dan kota. Hal ini dapat ditunjukkan oleh tingkat koefisien yang berbeda-beda tiap wilayah. Perbedaan nilai koefisien ini akan menjelaskan variabel bebas akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing kabupaten dan kota se eks Karesidenan Kediri.

Tabel 4.13
Interpretasi Koefisien *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Individual Effect
C	77.18893	
Fixed Effects (Cross)		
_TRENGGALEK--C	2.285878	79.474808
_TULUNGAGUNG--C	4.858088	82.047018
_BLITAR--C	6.093348	83.282278
_KEDIRI--C	9.245115	86.434045
_NGANJUK--C	6.299942	83.488872
_KOTAKEDIRI--C	-14.78953	62.39940
_KOTABLITAR--C	-13.99285	63.19608

Sumber: Lampiran 7, data diolah

Dari tabel 4.13 tersebut, dapat dilihat bahwa adanya pengaruh *cross section* yang berbeda-beda pada setiap kabupaten/kota yang berada di eks karesidenan Kediri pada variabel-variabel bebasnya terhadap variabel terikat.

a. Kabupaten Trenggalek

Diketahui nilai *coefficient* konstanta sebesar 77,18893 dan nilai *coefficient fixed effect* yang dimiliki Kabupaten Trenggalek sebesar 2,285878

sehingga Kabupaten Trenggalek memiliki pengaruh *individual* sebesar 79,474808, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah antar wilayah dan waktu, maka Kabupaten Trenggalek akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PAD sebesar 79,474808 satuan.

b. Kabupaten Tulungagung

Diketahui nilai *coefficient* konstanta sebesar 77,18893 dan nilai *coefficient fixed effect* yang dimiliki Kabupaten Tulungagung sebesar 4,858088 sehingga Kabupaten Tulungagung memiliki pengaruh *individual* sebesar 82,047018, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah antar wilayah dan waktu, maka Kabupaten Tulungagung akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PAD sebesar 82,047018 satuan.

c. Kabupaten Blitar

Diketahui nilai *coefficient* konstanta sebesar 77,18893 dan nilai *coefficient fixed effect* yang dimiliki Kabupaten Blitar sebesar 6,093348 sehingga Kabupaten Blitar memiliki pengaruh *individual* sebesar 83,282278, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah antar wilayah dan waktu, maka Kabupaten Blitar akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PAD sebesar 83,282278 satuan.

d. Kabupaten Kediri

Diketahui nilai *coefficient* konstanta sebesar 77,18893 dan nilai *coefficient fixed effect* yang dimiliki Kabupaten Kediri sebesar 9,245115 sehingga Kabupaten Kediri memiliki pengaruh *individual* sebesar 86,434045, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah antar wilayah dan waktu, maka Kabupaten Kediri akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PAD sebesar 86,434045 satuan.

e. Kabupaten Nganjuk

Diketahui nilai *coefficient* konstanta sebesar 77,18893 dan nilai *coefficient fixed effect* yang dimiliki Kabupaten Nganjuk sebesar 6,299942 sehingga Kabupaten Nganjuk memiliki pengaruh *individual* sebesar 83,488872, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah antar wilayah dan waktu, maka Kabupaten Nganjuk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PAD sebesar 83,488872 satuan.

f. Kota Kediri

Diketahui nilai *coefficient* konstanta sebesar 77,18893 dan nilai *coefficient fixed effect* yang dimiliki Kota Kediri sebesar -14,78953 sehingga Kota Kediri memiliki pengaruh *individual* sebesar 62,39940, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah antar wilayah dan waktu,

maka Kota Kediri akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PAD sebesar 62,39940 satuan.

g. Kota Blitar

Diketahui nilai *coefficient* konstanta sebesar 77,18893 dan nilai *coefficient fixed effect* yang dimiliki Kota Blitar sebesar -13.99285 sehingga Kota Blitar memiliki pengaruh *individual* sebesar 63.19608, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah antar wilayah dan waktu, maka Kota Blitar akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PAD sebesar 63.19608 satuan.

Dari hasil interpretasi perkabupaten dan kota tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai *cross section* yang berupa konstanta masing-masing wilayah akan menentukan besar kecilnya pengaruh individu wilayah tersebut terhadap PAD. Ketujuh wilayah Kabupaten/Kota diatas yang memiliki pengaruh individu terbesar terhadap pendapatan asli daerah adalah Kabupaten Kediri dan wilayah yang paling kecil pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah adalah Kota Kediri.

5. Pengujian Statistik Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu uji *chow* dan uji *hausman*, menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan yakni model *Fixed Effect* dan model ini telah lolos dalam uji asumsi klasik kecuali model ini mengalami gejala autokorelasi yang disembuhkan dengan merubah *coef*.

covariance-nya. Dan selanjutnya model *Fixed Effect* ini dapat dilakukan untuk uji hipotesis (uji T dan uji F) dan koefisien determinasi.

a. Uji Hipotesis

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

H₂ : Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

H₃ : Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

H₄ : Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

H₅ : Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

H₆ : PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

1) Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yaitu PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah. Dimana pengambilan keputusan pada uji ini yaitu:

- a) Jika nilai probabilitas t-statistik $> 0,05$ maka hipotesis tidak teruji dan jika nilai probabilitas t-statistik $< 0,05$ maka hipotesis teruji.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis tidak teruji dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis teruji. Adapun nilai t_{tabel} yang didapat sebesar 2,00856 yang diperoleh dengan cara mencari $df = n - k = 56 - 6 = 50$, nilai $\alpha = 5\%$. Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan uji t sebagai berikut.

- a) Variabel Produk Domestik Regional Bruto

Diketahui nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0007. Dimana nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,0007 < 0,05$, sehingga dapat diputuskan H_0 ditolak dan menerima H_1 yang artinya bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri. Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3,670619 dan t_{tabel} sebesar 2,00856. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,670619 > 2,00856$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.

- b) Variabel Jumlah Penduduk

Diketahui nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0094. Dimana nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,0094 < 0,05$, sehingga dapat diputuskan H_0 ditolak dan menerima H_2 , yang artinya bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri. Dari tabel

tersebut diketahui nilai t_{hitung} sebesar $-2,716957$ dan t_{tabel} sebesar $2,00856$. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,716957 > 2,00856$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.

c) Variabel Pengeluaran Pemerintah

Diketahui nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,7940$. Dimana nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,7940 > 0,05$, sehingga dapat diputuskan H_0 diterima dan menolak H_3 , yang artinya bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri. Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{hitung} sebesar $0,262713$ dan t_{tabel} sebesar $2,00856$. Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,262713 < 2,00856$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.

d) Variabel Pajak Daerah

Diketahui nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,0000$. Dimana nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat diputuskan H_0 ditolak dan menerima H_4 , yang artinya bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri. Dari tabel

tersebut diketahui nilai t_{hitung} sebesar 5,897590 dan t_{tabel} sebesar 2,00856. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,897590 > 2,00856$, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang berarti bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.

e) Variabel Retribusi Daerah

Diketahui nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,8983. Dimana nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,8983 > 0,05$, sehingga dapat diputuskan H_0 diterima dan menolak H_5 , yang artinya bahwa retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri. Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{hitung} sebesar 0,128535 dan t_{tabel} sebesar 2,00856. Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,128535 < 2,00856$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di eks karesidenan Kediri.

2) Uji Signifikansi Secara Keseluruhan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan pada pengujian terhadap pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F ini akan menunjukkan hasil apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Dimana pengambilan keputusan pada uji ini yaitu:

- a) Jika nilai probabilitas t-statistik $> 0,05$ maka hipotesis tidak teruji dan jika nilai probabilitas t-statistik $< 0,05$ maka hipotesis teruji.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis tidak teruji dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis teruji. Adapun nilai F_{tabel} yang didapat sebesar 2,40 yang diperoleh dengan cara mencari N_1 dan N_2 . $N_1 = k - 1 = 6 - 1 = 5$, $N_2 = n - k = 56 - 6 = 50$, nilai $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 4.8, nilai probabilitas F-statistik diperoleh sebesar 0,0000, dimana nilainya lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi, yaitu $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_6 , yang artinya bahwa PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di eks karesidenan Kediri. Sedangkan nilai F_{hitung} diketahui sebesar 212,2741 dan F_{tabel} sebesar 2,40. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $212,2741 > 2,40$ maka dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima yang berarti bahwa PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di eks karesidenan Kediri.

b. Uji Variabel Dominan

Pengujian ini untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan berpengaruh pada variabel dependen. Berdasarkan hasil dari Uji parsial dari kelima variabel independen terdapat tiga variabel independen yang

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yaitu terdiri dari produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pajak daerah. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dan retribusi daerah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dua variabel ini harus dieliminasi dari pengujian variabel yang paling dominan.

Variabel PDRB, jumlah penduduk, dan pajak daerah telah lolos untuk memenuhi kriteria pengaruh signifikan. Dari ketiga variabel tersebut, PDRB memiliki nilai *Coefficient* sebesar 3.175469, jumlah penduduk memiliki nilai *Coefficient* sebesar -11.96984 dan pajak daerah memiliki nilai *Coefficient* sebesar 0.419523. Dari ketiga variabel ini yang mempunyai nilai *Coefficient* terbesar dan paling menjauhi angka 0, yaitu jumlah penduduk. Sehingga variabel jumlah penduduk diantara variabel lainnya merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

c. Pengujian Koefisien Determinan

Pengujian koefisien determinan (*Adjusted R²*) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi dalam variabel bebas secara statistik. Berdasarkan dari hasil pada tabel 4.8, diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,976881 yang berarti bahwa dalam model regresi ini. Variabel pendapatan asli daerah sebesar 97,69% dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sisanya sebesar 2,31% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.